



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 84B
TAHUN 2020 TENTANG POLA KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar penataan arsip mengenai Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu disusun klasifikasi arsip yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta perkembangan mekanisme kinerja dan teknologi sehingga perlu mengubah Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 84B Tahun 2020 tentang Pola Klasifikasi Arsip Pemerintah Kota Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 84B Tahun 2020 Tentang Pola Klasifikasi Arsip Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

Memperhatikan

1. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);
3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019);
4. Peraturan Walikota Nomor 84B Tahun 2020 Tentang Pola Klasifikasi Arsip Pemerintah Kota Pekalongan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 84B TAHUN 2020 TENTANG POLA KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Lampiran angka 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576 dan 577 dalam Lampiran Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 84B Tahun 2020 Tentang Pola Klasifikasi Arsip Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 84B) diubah sebagai berikut :
semula

570	PERMODALAN
571	Modal Domestik
	Naskah/Dokumen yang berkaitan dengan modal domestik
572	Modal Asing
	Naskah/Dokumen yang berkaitan dengan Modal Asing
573	Modal Patungan (Joint Venture)/Penyertaan Modal
	Naskah/Dokumen yang berkaitan dengan modal patungan/penyertaan modal

Diubah menjadi

570	PENANAMAN MODAL		
571	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		
571	.1	Deregulasi Penanaman Modal	
		Naskah/dokumen yang berkaitan dengan Deregulasi Penanaman Modal di Daerah.	
	.1	.1	Penetapan Kebijakan Daerah pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal
			Naskah/dokumen yang berkaitan dengan Penetapan kebijakan daerah pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal meliputi Pengkajian, penyiapan kebijakan, Perumusan kebijakan, masukan, dokumen kebijakan, dan Penetapan NSPK
	.1	.2	Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
			Naskah/Dokumen yang berkaitan dengan evaluasi, perkembangan dan pelaporan pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal

Sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 12 Juli 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,

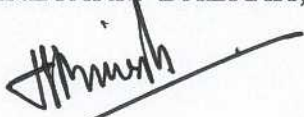
Cap

Ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 29

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 84B
TAHUN 2020 TENTANG POLA
KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN.

570	PENANAMAN MODAL			
571	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
571	.1	Deregulasi Penanaman Modal		
		Naskah/dokumen yang berkaitan dengan Deregulasi Penanaman Modal di Daerah.		
	.1	1	Penetapan Kebijakan Daerah pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal	
			Naskah/dokumen yang berkaitan dengan Penetapan kebijakan daerah pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal meliputi Pengkajian, penyiapan kebijakan, Perumusan kebijakan, masukan, dokumen kebijakan, dan Penetapan NSPK	
	.1	2	Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	
			Naskah/Dokumen yang berkaitan dengan evaluasi, perkembangan dan pelaporan pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	
	.2	Pengembangan Potensi Daerah		
		Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan Pengembangan Potensi Daerah.		
	.2	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	
			Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan Pengembangan Potensi Daerah meliputi penyusunan rencana umum penanaman modal	
	.2	2	Pemetaan Potensi dan Peluang Usaha	
			Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan pengembangan potensi daerah meliputi pemetaan potensi dan peluang usaha.	
	.3	Pemberdayaan Usaha		
		Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan Pemberdayaan Usaha		
	.3	1	Pembinaan dan penyuluhan	
			Naskah/ dokumen yang berkaitan Pemberdayaan Usaha meliputi pembinaan dan penyuluhan	
	.3	1	1	Pembinaan
				Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan

				Pemberdayaan Usaha meliputi pembinaan.
	.3	1	2	Penyuluhan
				Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan Pemberdayaan Usaha termasuk penyuluhan.
	.3	2		Kemitraan Usaha
				Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan pembinaan dan penyuluhan termasuk kemitraan usaha.
	.3	3		Pelayanan Usaha
				Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan pembinaan dan penyuluhan termasuk pelayanan usaha.
572	PROMOSI PENANAMAN MODAL			
572	.1			Pengembangan Promosi
				Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan Pengembangan Promosi di Daerah.
	.1	1		Analisis/ Pengembangan Strategi Promosi
				Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan Analisis/ Pengembangan Strategi Promosi
	.1	1	1	Analisis Target Promosi
				Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan Analisis/ pengembangan Strategi Promosi termasuk Analisis Target Promosi
	.1	1	2	Analisis Daya Saing Promosi
				Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan Analisis/ Pengembangan Strategi Promosi termasuk Analisis Daya Saing Promosi.
	.1	2		Fasilitas Promosi Luar Negeri
				Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan Fasilitas Promosi Luar Negeri
	.2			Pameran dan Sarana Promosi
				Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan Pameran dan sarana Promosi.
	.2	1		Pameran
				Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan Pameran
	.2	1	1	Penyusunan Program dan Monitoring
				Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan Pameran termasuk Penyusunan Program dan Monitoring.
	.2	1	2	Penyelenggaraan dan Evaluasi
				Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan Pameran termasuk Penyelenggaraan dan Evaluasi
	.2	2		Media Cetak
				Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan media cetak
	.2	2	1	Materi Promosi
				Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan media cetak termasuk materi promosi.
	.2	2	2	Publikasi dan Distribusi
				Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan media cetak termasuk publikasi dan distribusi.

	.2	3	Media Elektronik
			Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan promosi penanaman modal melalui media elektronik
	.2	3	1 Materi Promosi
			Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan media elektronik termasuk materi promosi
	.2	3	2 Pelayanan Informasi
			Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan pelayanan informasi penanaman modal
573	PELAYANAN PENANAM MODAL		
573	.1	Penyedia Aplikasi perizinan berbasis sistem pelayanan terintegrasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan Penyedia Aplikasi perizinan berbasis sistem pelayanan terintegrasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
	.1	1	Aplikasi Baru
			Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan aplikasi baru.
	.1	2	Aplikasi Perluasan
			Naskah/ dokumen yang berkaitan aplikasi perluasan.
	.1	3	Aplikasi Perubahan
			Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan aplikasi perubahan.
	.2	Pelayanan Perizinan	
		Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan Pelayanan Perizinan.	
	.2	1	Perizinan SIUP (yang sudah diambil OSS)
			Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan Perizinan SIUP (yang sudah diambil OSS).
	.2	2	Perizinan Non SOS (IMB, PBG)
			Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan Perizinan Non SOS (IMB, PBG)
	.3	Pelayanan Fasilitas, Konsultasi dan Pengaduan terhadap Layanan .	
		Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan Pelayanan Fasilitas, Konsultasi dan Pengaduan terhadap Layanan	
	.4	Pemantauan Pemenuhan Komitmen perizinan dan non perizinan Penanaman modal	
		Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan Pemantauan Pemenuhan Komitmen perizinan dan non perizinan Penanaman modal	
	.5	Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/ insentif daerah.	
		Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/ insentif daerah.	
574	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
574	.1	Pemantauan Penanaman Modal	
		Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan Pemantauan	

		Penanaman Modal
	.2	Bimbingan, sosialisasi dan Pembinaan Ketentuan Penanaman modal
		Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan bimbingan, sosialisasi dan pembinaan ketentuan penanaman modal
	.3	Fasilitasi Penyelesaian Masalah
		Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan fasilitasi penyelesaian masalah.
	.4	Pengawasan Penanaman Modal
		Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan pengawasan penanaman modal
	.5	Pencabutan/ pematalan perizinan penanaman modal
		Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan Pencabutan/ pematalan perizinan penanaman modal.
	.6	Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal
		Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal.
575	PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
575	.1	Pengelolaan data dan informasi penanaman modal
		Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan Pengelolaan data dan informasi penanaman modal
	.2	Pemanfaatan data dan informasi penanaman modal
		Naskah/ dokumen yang berkaitan dengan Pemanfaatan data dan informasi penanaman modal.

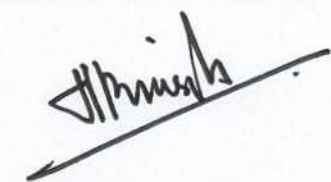
WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

Ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

SEKRETARIS DAERAH



SRI RUMININGSIH